

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI KEKUATAN POLITIK

ZAKARIA HABIB AL-RA'ZIE

Universitas Pamulang

Emai: zakaria@unpam.ac.id

Abstract: *Non-Governmental Organizations (NGOs) are non-governmental organizations that fall into the category of political power because they are in direct contact with government policies which are in the political realm. Among the interests of NGOs is that government policies have a widespread impact on society. The presence of NGOs in a modern and democratic political system cannot be avoided, because their presence is needed as mediators or channelers of people's aspirations to the government. However, NGOs can be divided into 3 groups based on their activities and the real interests they are fighting for. This research maps the types of NGOs based on an analysis of the practices carried out by NGOs. This research uses a qualitative method of literature study which is descriptive analysis. The research results found that the practices carried out by a number of NGOs show a shift in the meaning that NGOs do not always fight for the public interest, but can be used to advance personal and group interests.*

Keywords: *Institution; Self-Help; Public; strength; Political.*

Abstrak: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi non-pemerintah yang masuk dalam kategori kekuatan politik sebab bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah yang merupakan ranah politik. Diantara kepentingan LSM supaya kebijakan pemerintah memberikan dampak yang meluas pada masyarakat. Kehadiran LSM dalam sistem politik yang modern dan demokratis tidak bisa dihindari, sebab kehadirannya diperlukan sebagai penengah atau penyalur aspirasi masyarakat pada pemerintah. Namun LSM dapat terbagi menjadi 3 kelompok dilihat berdasarkan kegiatan dan kepentingan riil yang diperjuangkan. Penelitian ini memetakan jenis LSM berdasarkan analisis atas praktik yang dilakukan oleh LSM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik yang dilakukan sejumlah LSM menunjukkan pergeseran makna bahwa LSM tidak selalu memperjuangkan kepentingan publik, namun bisa difungsikan untuk mengusahakan kepentingan pribadi dan kelompok.

Kata Kunci: Lembaga; Swadaya; Masyarakat; Kekuatan; Politik.

A.Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu institusi non-pemerintah yang menjadi wadah bagi sebagian masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga ini merupakan bagian dari Masyarakat Madani yang bekerja bukan untuk mengumpulkan profit, melainkan melakukan amal, advokasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Menurut Mansour Fakih kehadiran LSM sebagai bagian dari masyarakat semakin diperlukan sebab LSM memiliki cita-cita demi demokrasi, transformasi dan keadilan sosial (Stephanus, 2018, p. 142). Melalui pandangan dan program aksinya LSM menampilkan diri sebaik mungkin sebagai institusi yang menyuarakan apa yang diinginkan oleh nurani masyarakat dan mengingatkan para penyelenggara negara supaya memenuhi tanggungjawabnya dengan membuat dan menjalankan kebijakan yang sebaik mungkin dan tidak sewenang-wenang. Berdasarkan peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut, maka LSM dapat diidentifikasi sebagai salah satu dari kekuatan politik. Ia memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan (*check ang balances*), termasuk melakukan protes apabila pemerintah dinilai mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat.

Di Indonesia LSM baru hadir dan mengalami perkembangan pesat pada tahun 1970-an dari segi jumlah, keagamaan dan persebaran lokasi kegiatannya (Assadi et al., 2009, p. 233). LSM hadir untuk merespon kondisi masyarakat Indonesia yang saat itu dibaluti oleh kesulitan dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan oleh

negara, dan sebagainya. Sementara pemerintah saat itu dinilai belum cukup mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat utamanya yang kelas bawah. Namun sejak kelahiran tersebut, LSM Indonesia disepakati sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang mendasar dari masyarakat. Dan semua orang yang bergabung di dalamnya dimotivasi oleh rasa kerelaan untuk berjuang, dan bukan karena didorong oleh rasa terpaksa untuk bergabung, apalagi sekedar motif untuk mencari penghasilan (Daeli, 2012, p. 58).

Berdasarkan peran idealnya, LSM sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk juga oleh pemerintah, supaya terwujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Namun pada faktanya, tidak jarang LSM juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengkhianati peran idealnya tersebut, sehingga LSM hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu tersebut. Ada banyak contoh dari kejadian ini di Indonesia, utamanya di daerah-daerah. Pada kasus-kasus itu LSM berubah fungsi dari lembaga yang non-profit menjadi sekedar alat bisnis dan tawar-menawar politik. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang LSM, peran idealnya, dan praktik riilnya di lapangan dengan mengambil sejumlah contoh kasus di Indonesia. Dari uraian tersebut maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah tentang peran ideal dan praktik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia sebagai salah satu kekuatan politik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan seperti buku karya Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM (Abidin & Rukmini, 2004). Buku ini membahas tentang berbagai konsep, masalah dan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas LSM. Dasar agumennya adalah kebangkitan LSM di Indonesia sejak era reformasi di satu sisi menunjukkan kebangkitan masyarakat madani untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya, termasuk dengan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun di sisi yang lain, muncul banyak praktik penyimpangan yang dilakukan oleh LSM, seperti terlibat langsung dalam pertarungan kekuasaan, *money politics*, penyelewengan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu buku ini juga menampilkan refleksi kritis para penggiat LSM, juga memuat pandangan dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi konstituen LSM, seperti akademisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan masyarakat awam yang sering dimanfaatkan namanya oleh LSM. Kemudian ada juga skripsi karya Nunug Gazali berjudul Fungsi Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) sebagai Kekuatan politik dalam Mengawal Kasus Korupsi di Sumatera Barat (Gazali, 2017). Skripsi ini membahas tentang fungsi LSM sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSM belum cukup kuat dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat. Sebab gerakan LSM terhambat oleh respon para penegak hukum yang dinilai lambat dalam menyelesaikan kasus korupsi.

Ada dua konsep pokok yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan konsep Kekuatan Politik. Konsep LSM yang dimaksud merupakan salah satu organisasi yang lahir dari masyarakat yang bukan organisasi pemerintah, birokrasi atau negara yang bekerja untuk kepentingan masyarakat (Yatimah, 2024, p. 31). Sementara konsep kekuatan politik yang dimaksud adalah lembaga atau bentuk lain yang melembaga yang memiliki tujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam bentuk tuntutan maupun dukungan terhadap suprastruktur politik yang menjalankan sistem poliitik (Waris, 2023, p. 1).

Ada dua teori yang akan digunakan untuk menganalisis objek pembahasan dalam makalah ini, yakni teori *civil society* (masyarakat madani) dan *rent seeking society* (masyarakat pemburu rente) yang bersambung dengan teori *rational choice*. Larry Diamond mendefinisikan *civil society* atau masyarakat madani sebagai sebuah bentuk dari kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, melahirkan dirinya sendiri, secara umum mandiri, otonom dari negara, dan terikat oleh hukum atau aturan main yang disepakati bersama (Asrida et al., 2021, p. 136). Dengan begitu, Diamond membedakan antara pengertian masyarakat madani dengan “masyarakat” biasa. Menurut Diamond, masyarakat dalam pengertian umum adalah

warga negara yang secara umum terikat dan mengalami ketergantungan dengan negara, dan dapat dikondisikan oleh negara.

Masyarakat madani bagi Diamond ibarat entitas perantara yang berada di posisi tengah antara ranah individual (privat) dan negara. Meskipun begitu para aktor dalam masyarakat madani tetap membutuhkan perlindungan hukum yang resmi, yakni dasar hukum yang diakui oleh negara untuk menjaga independensi atau otonomi dan kebebasan beraktifitas masyarakat madani tersebut. Dalam konteks dasar hukum ini, sebenarnya masyarakat madani tidak hanya berperan sebagai pihak yang membatasi kekuasaan negara, melainkan pada saat yang sama juga memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan legitimasi pada otoritas negara berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu menurut Diamond, sekiranya memang terjadi kekosongan hukum di sebuah negara, masyarakat madani bisa jadi akan tetap ada dan bertahan. Asalkan pada saat itu elemen masyarakat madani tetap menjalankan nilai-nilai yang disepakati bersama seperti mengakui pluralitas dan anti terhadap penggunaan kekerasan (Diamond, 1994, pp. 5–6). Menurut Diamond ada empat ciri yang menandakan masyarakat madani. *Pertama*, masyarakat madani fokus pada kepentingan publik dan bukan privat. *Kedua*, masyarakat madani dalam konteks dan tingkat tertentu memang berhubungan dengan negara, namun bukan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan formal atau jabatan di pemerintahan. Tapi, bagi organisasi masyarakat madani dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan di pemerintahan, ingin mengubah kebijakan pemerintah dan ‘mengatur negara’, sebenarnya masih bisa dimasukkan dalam kategori masyarakat madani, asalkan tujuan dari tindakan mereka itu adalah demi kepentingan publik. Kemudian ciri *ketiga* dari masyarakat madani adalah memiliki paham pluralisme dan mengakui serta menghormati kebhinekaan. Dan ciri *keempat* masyarakat madani adalah keberpihakan, yang menandakan bahwa tidak ada kelompok di dalam masyarakat madani yang berusaha mewakili kepentingan pribadi maupun komunitas (Diamond, 1994, pp. 6–7). Berdasarkan definisi Diamond tentang masyarakat madani, maka ada banyak kelompok masyarakat atau organisasi yang masuk dalam kategori masyarakat madani. Mulai dari kelompok keagamaan, suku, kebudayaan, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, penerbitan, asosiasi kelompok dagang dan industri seperti KADIN di Indonesia dan lain sebagainya. Semua kelompok tersebut dalam tatanan ideal memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan dan mempertahankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.

Menurut Olson (1982) praktik mencari rente (*rent seeking*) merupakan tindakan setiap kelompok berkepentingan (politisi, birokrat, masyarakat) yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya (monopoli keuntungan) secara ilegal dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Melina, 2017, p. 1). Dasar argumennya adalah bahwa individu merupakan makhluk rasional, dan karena itu mereka akan berusaha untuk memaksimalkan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan akumulasi kesejahteraan. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya (Budiardjo, 2008, p. 93).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpegang interpretasi, asumsi, dugaan, nilai dan pendapat dari peneliti sehingga membuat hasil penelitian menjadi lebih jelas dan mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan keunikan dari pengaruh sosial yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan ini yang menjadi faktor kunci adalah peneliti (Ismail Nurudin, 2019, p. 75). Berdasarkan hal tersebut metode penelitian kualitatif paling sesuai dengan tema penelitian yang diambil, yakni studi kasus tentang fenomena politik yang berlangsung sangat dinamis. Melalui penelitian ini fenomena apapun yang dikaji baik alamiah maupun hasil rekayasa manusia dapat digambarkan dengan baik (Zakaria Habib Al-Ra'zie & Heru Wahyudi, 2022, p. 133)

C.Hasil dan Pembahasan

Akar LSM di Indonesia sudah muncul sejak awal abad ke-20, yakni sebagai respon terhadap persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat. Namun sejak Indonesia merdeka LSM pertama yang hadir adalah Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang lahir pada 1957. LSM ini kemudian menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) (Isrok & Al Uyun, 2012, p. 157).

Pada 1960-an mulai muncul LSM-LSM baru sebagai bentuk kritik terhadap LSM-LSM sebelumnya yang dinilai tidak cukup mampu melakukan kerja-kerja yang efektif dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan dan hal yang terkait dengan itu. Selain itu kehadiran LSM baru ini juga merupakan suatu bentuk kritik atas strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang disebut sebagai *trickle down effect* (Syamsurijal, 2024).

Kemudian perkembangan tersebut semakin diperkuat lagi pada 1980-an dengan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan dan perubahan sosial ekonomi secara damai. Karena itu para aktivis LSM pada masa itu berpandangan bahwa di dalam sistem politik, sosial dan ekonomi yang sudah mapan pada masa Orde Baru upaya pembangunan masyarakat dengan skala kecil-kecilan sudah tidak efektif lagi. Karena itu pada perkembangan selanjutnya muncul LSM yang lebih berorientasi untuk mewujudkan perubahan struktural. Namun hal ini ternyata tidak disukai oleh Orde Baru. Melalui penerbitan UU Nomor 8 tahun 1985 Orde Baru melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap Organisasi Kemasyarakatan termasuk LSM. Sehingga kondisi itu memperlemah upaya masyarakat dalam mempengaruhi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun angin segar kembali didapat LSM pada 1998 ketika saat reformasi terjadi dan rezim Orde Baru tumbang (Budiardjo, 2008, p. 389).

Merujuk pada pandangan aktivis LSM Senior Indonesia, Topatimasang, ada lima jenis paradigma LSM di Indonesia jika dilihat dari sisi orientasinya, yakni paradigma kesejahteraan, paradigma modernisasi, paradigma reformasi, paradigma pembebasan, dan paradigma transformasi (Budiardjo, 2008, p. 390).

Paradigma kesejahteraan meyakini bahwa penderitaan masyarakat seperti kemiskinan dan keterbelakangan merupakan takdir. Karena itu mereka berupaya membantu masyarakat dengan cara memberikan santunan.

Sementara menurut paradigma modernisasi, bahwa keterbelakangan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi akibat dari rendahnya pendidikan, penghasilan, ketrampilan, dan kurangnya gizi. Karena itu fokus kegiatan LSM ini adalah dengan mengupayakan pembangunan dan peningkatan prasarana, termasuk dengan memberikan bantuan modal untuk usaha.

Menurut paradigma reformasi sumber masalah sosial dan penderitaan masyarakat adalah lemahnya pendidikan, korupsi, mismanajemen, dan inefisiensi. LSM dengan paradigma ini fokus pada upaya memperbanyak tenaga profesional, perbaikan peraturan dan perundang-undangan, dan pemberian sanksi yang berat pada pelanggaran hukum.

Sementara menurut paradigma pembebasan (liberasi), akar dari seluruh persoalan sosial yang dihadapi masyarakat adalah karena adanya penindasan, penghisapan, eksploitasi dan pembodohan terhadap rakyat. Karena itu kegiatan yang dilakukan LSM berparadigma ini antara lain dengan memberikan pendidikan politik, membina kader gerakan, mobilisasi aksi, dan menggelar kampanye untuk membentuk opini publik. LSM jenis ini lebih menginginkan perubahan yang bersifat struktural dan menghargai serta mengelola konflik. Padangan politiknya radikal, liberal dan menuntut otonomi mutlak untuk rakyat.

Adapun menurut paradigma transformasi, bahwa sumber keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu LSM dengan paradigma ini sangat berkeinginan untuk menciptakan tatanan baru yang lebih adil dan tidak segan-segan untuk berkonflik. LSM jenis ini mirip dengan LSM berparadigma liberasi yang poolis, militan dan berdisiplin tinggi. LSM berparadigma transformasi ini sangat mempercayai bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan.

1. Tipe-Tipe LSM

Menurut John Clark LSM dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni LSM Plat Putih, LSM Plat Merah, dan LSM Plat Hitam (Auliya, 2023, p. 26). LSM Plat putih merujuk pada LSM yang benar-benar ingin membantu masyarakat bebas dari penderitaan kebodohan dan kemiskinan. LSM jenis ini memiliki idealisme dan integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk diintervensi baik oleh pemerintah maupun pihak pendonor.

Sementara LSM Plat Merah adalah jenis LSM yang bekerjasama dengan pemerintah atau bahkan sengaja diciptakan dan dipelihara pemerintah untuk menjadi pendukung kebijakan pemerintah dan alat pemerintah untuk berhadapan dengan LSM Plat Putih yang kritis pada pemerintah. LSM jenis ini sifatnya pragmatis dan politis, dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat umum.

Adapun LSM Plat Hitam adalah jenis LSM yang lahir tanpa idealisme dan visi misi yang jelas. Ia lahir akibat dari tekanan ekonomi dan rendahnya moral yang dimiliki para pendirinya. LSM jenis ini tidak ragu untuk menjual idealismenya demi uang, termasuk memeras pihak tertentu (utamanya di pemerintahan) dengan dokumen dan informasi yang mereka miliki. LSM jenis ini memanfaatkan persoalan politik untuk kepentingan materi karenanya mudah saja untuk ditunggangi.

2. Peran Ideal LSM sebagai Kekuatan Politik

Peran ideal dari LSM adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengawal dan mendorong program pembangunan dan kebijakan dari para penguasa (Pranoto, 2023, p. 6). Untuk mencapai tujuan itu LSM tidak ragu untuk berkorban dan mengambil resiko. LSM berperan memberikan pelayanan kemanusiaan pada masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka pada pemerintah, mengawasi jalannya kebijakan dan program pemerintah, dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. Selain itu LSM juga menyediakan pelayanan dalam mengangkat isu-isu tertentu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), perdamaian, pembangunan, konservasi dan lingkungan hidup dan hak lain yang bertujuan sosial (Yatimah, 2024, p. 34).

LSM sebagai kekuatan yang berasal dari masyarakat memang harus bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun pada situasi dan kondisi tertentu ada masanya LSM juga bertindak sebagai penjelas kebijakan pemerintah. Dalam pemahaman ini LSM tidak harus bertindak sebagai kekuatan oposan terhadap pemerintah, karena LSM adalah mitra pemerintah dalam proses merealisasikan pembangunan khususnya dalam ruang dan sistem demokrasi. Bahkan di negara Eropa Barat dan Amerika LSM disebut sebagai pilar keempat demokrasi bersama trias politika eksekutif, legislatif dan yudikatif (Bastian, 2007, p. 35).

Dalam menjalankan aktivitasnya LSM didukung oleh sejumlah sumberdaya yang menjadi kekuatannya, antara lain pendanaan atau anggaran, jaringan dan informasi. Pendanaan yang diterima LSM berasal dari hasil kerjasama dengan para pendonor baik lembaga maupun perorangan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Anjaini et al., 2024, p. 375). Dana tersebut didapatkan dengan cara mengajukan proposal pada pihak pendonor. Kegiatan yang dilakukan LSM sangat tergantung dengan anggaran operasional yang dimiliki. Semakin tinggi dana yang dimiliki, maka semakin banyak program yang bisa direalisasikan. Dan semakin banyak serta berkualitas program yang dikerjakan LSM, maka akan semakin banyak dana yang bisa mereka dapatkan karena tingginya kepercayaan publik dan para pendonor.

Kemudian, semakin luas jaringan yang dimiliki LSM maka akan semakin memudahkan aktifitas yang dilakukan LSM tersebut. Sebab melalui jaringan itu LSM bisa mendapatkan bantuan dana, informasi dan akses yang diperlukan untuk kerja-kerja mereka. Karena itu sudah sewajarnya jika LSM meluaskan jaringannya baik di dalam negeri hingga menjangkau ke dunia internasional.

Kekuatan selanjutnya yang menjadi senjata LSM adalah data atau informasi. Melalui data LSM bisa bergerak melakukan kritik dan menawarkan solusi pada pemerintah atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui data juga LSM bisa mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari pihak pendonor. Karena itu data-data yang akurat menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh LSM. Jika LSM menggunakan data yang tidak akurat,

maka suara LSM baik dalam bentuk kritik maupun tawaran solusi tidak akan didengar apalagi dipercaya.

Pada tingkat tertentu LSM bisa lebih mudah mendapatkan data-data yang akurat ketimbang pemerintah, sebab proses kerjanya lebih fleksibel dan mudah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan pemerintah yang kadang cukup lambat dalam pengumpulan data karena rumitnya kerja-kerja birokrasi.

3. Praktik LSM di Indonesia

Ada banyak sekali LSM di Indonesia, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Jika merujuk pada data lembaga penelitian SMERU ada 2.848 LSM di Indonesia per 13 Maret 2017. Dan LSM dengan fokus pada isu lingkungan hidup adalah yang paling dominan di Indonesia secara kuantitas, yakni 675 organisasi. Hal ini setidaknya memunculkan dua dugaan, yakni kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang memang sudah darurat, atau ada pengkondisian tertentu dari pendonor asing yang menghendaki LSM di Indonesia fokus pada isu lingkungan hidup. Kemudian LSM yang fokus pada usaha kecil atau industri rumah tangga menempati posisi kedua terbanyak, yakni 181 LSM. Sementara pada urutan ketiga ditempati oleh LSM yang fokus pada permasalahan perempuan dan gender yang jumlahnya 100 LSM. Jika dilihat berdasarkan wilayah, sebagian besar LSM berada di pulau Jawa, antara lain DKI Jakarta (347), Jawa Barat (344), Jawa Tengah (221), dan Jawa Timur (195). Sementara sisanya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti NTT (166), Sulawesi Selatan (151), Nusa Tenggara Barat (149) ataupun Papua (123) (Tirto.id, 2017).

Sebagai contoh ada dua LSM besar di Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar dan diperhitungkan oleh Pemerintah, yakni *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mempunyai tujuan untuk mengawasi dan melaporkan pada masyarakat tentang aksi korupsi yang terjadi di Indonesia (Herliandhy, 2016, p. 41), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia (Liputan6.com, 2024).

Namun diluar LSM-LSM besar yang berpusat di pulau Jawa itu ada banyak LSM lain yang tersebar di daerah-daerah. LSM ini tergolong lembaga yang kecil sebab wilayah operasinya hanya sebatas di daerah-daerah saja, dan pendanaannya pun tergolong kecil jika dibandingkan dengan LSM besar. Meskipun begitu aktivitas LSM-LSM ini cukup menarik perhatian untuk dikaji guna membaca pola gerakan *civil society* di daerah-daerah.

Secara umum gerakan LSM di daerah masuk pada dua kategori yakni LSM Plat Merah dan Plat Hitam. LSM Plat Merah umumnya memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah sebab memiliki ketergantungan dengan bantuan dana dari pemerintah untuk operasional LSM tersebut. Mereka menghindari konfrontasi dengan pemerintah dan memberikan dukungan pada pemerintah atas kebijakan yang diambil. Sementara LSM Plat Hitam adalah jenis LSM pragmatis yang bergerak atas dasar motif ekonomi atau mencari penghasilan lewat organisasi.

Misalnya di Provinsi Bengkulu. Ada cukup banyak LSM di Provinsi Bengkulu yang tersebar di kota dan sejumlah kabupaten lain. Secara umum jenis LSM di Bengkulu adalah LSM Plat Merah dan Plat Hitam. Tapi LSM Plat Merah tidak begitu menarik untuk dibahas. Namun dalam pengamatan peneliti setidaknya ada satu LSM yang masuk dalam kategori LSM Plat Putih, yakni Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. LSM ini cukup kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan di Provinsi Bengkulu, utamanya di kota Bengkulu, dan khususnya terkait kasus korupsi. Mereka bersuara cukup lantang untuk mendesak pihak berwenang menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di Bengkulu. Misalnya kasus korupsi dana bantuan sosial kota Bengkulu 2013-2014 yang diduga melibatkan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan. Kemudian kasus pembangunan pasar Tradisional Modern Panorama, dugaan tindak pidana korupsi bansos Pemkot Bengkulu tahun 2012 yang melibatkan beberapa mantan anggota DPRD Kota Bengkulu, perkara korupsi gratifikasi anggota DPRD Kota Bengkulu dalam pembahasan dan

pengesahan APBD Kota Bengkulu tahun 2012, 2013, dan 2014, dan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kota Bengkulu dan staf sekretariat DPRD (Kompas.com, 2017).

Namun selain LSM Plat Putih tersebut, ada banyak LSM lain di Bengkulu yang masuk dalam kategori LSM Plat Hitam. Yakni LSM yang bekerja semata-mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek anggotanya dan bukan demi kepentingan masyarakat. Memang benar kadang kala isu yang mereka jadikan senjata adalah isu kepentingan masyarakat, namun motif utama dari penggunaan isu itu adalah untuk mendapatkan uang dengan cara memeras. Ada banyak contoh kasusnya antara lain: Pertama, oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap kontraktor di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oknum LSM ini mendatangi si kontraktor dengan membawa foto proyek irigasi yang dikerjakan oleh kontraktor. Kedua oknum LSM ini mengancam akan melaporkan masalah proyek itu ke aparat hukum dan akan mempublisnya ke media massa jika kontraktor tidak menyerahkan uang senilai Rp. 4 juta kepada mereka (suaraindonesia-news.com, 2018).

Kedua, kasus oknum LSM di Kabupaten Bengkulu Utara inisial AX yang diamankan Polres Bengkulu Utara karena diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan modus akan melaporkan kegiatan yang bermasalah di Diknas pada kejaksaan jika keinginannya tidak dipenuhi (Bengkulutoday.com, 2017).

Ketiga, kasus gabungan dari 4 LSM yang melakukan pemerasan pada kepala sekolah. LSM tersebut antara lain LSM Laskar Anak Bangsa, LSM Lidik, LSM KPMP, dan LSM Komnas PAN. Mereka mendatangi kepek dan menuduhnya telah melakukan pungli. Mereka mengancam akan mengekspos pungli tersebut, kecuali jika kepala sekolah itu memberikan uang tutup mulut sebesar Rp 2 juta (Bengkulu.sahabatrakyat.com, 2017).

Keempat, kasus sejumlah oknum LSM yang memeras kepala sekolah di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Kelompok LSM ini mengancam akan mempublikasikan adanya kekerasan dan perbuatan cabul yang ada di sekolah bila tidak diberikan uang Rp 12 juta (Kompas.com, 2023).

Semua contoh kasus itu dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dari para anggota LSM. Mereka mendesak oknum pejabat di daerah itu dengan menggunakan sejumlah data yang menjelaskan keburukan dari pejabat itu, misalnya data tentang penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Mereka memeras pejabat terkait supaya memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai biaya tutup mulut, jika tidak mereka mengancam akan membeberkan data yang mereka miliki itu pada publik. Terlepas benar atau tidaknya data tersebut, namun secara psikologis si pejabat akan tertekan dan jika isu itu menyebar maka reputasinya dan citranya di masyarakat maupun birokrasi bisa hancur.

Perilaku LSM Plat Hitam ini bisa dijelaskan dengan cukup baik menggunakan teori *rent seeking*. Jadi tindakan buruk yang dilakukan sejumlah LSM Plat Hitam itu karena mereka menganggap bahwa pemerasan adalah cara paling efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa perlu bekerja keras dan bekerja layak. Mereka hanya perlu memanfaatkan identitas lembaganya dan membawa isu-isu korupsi pada pihak yang diincar untuk diperas. Apalagi pejabat-pejabat dan birokrasi di daerah cenderung tidak mau ambil pusing dan cukup ketakutan jika citranya hancur di mata masyarakat. Mereka tidak begitu memperhatikan kredibilitas dari LSM yang memeras tersebut. Jika masalah seperti itu datang pada mereka, mereka lebih memilih untuk mengambil langkah yang aman dan praktis yakni dengan memenuhi tuntutan dari LSM Plat Hitam tersebut. Namun jika kejadian tersebut kembali berulang dan mereka semakin tertekan, baru kemudian mereka mengambil tindakan tegas dengan melaporkan oknum dan LSM Plat Hitam tersebut pada pihak berwajib.

D.Penutup

LSM merupakan organisasi non-pemerintah yang lahir dari masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang menimpa mereka. Berdasarkan konsep idelanya LSM bekerja semata-mata untuk membantu masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan materi dari kerjanya tersebut.

LSM masuk dalam kategori salah satu kekuatan politik sebab ia bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah yang merupakan ranah politik. LSM berkepentingan supaya kebijakan pemerintah memberikan dampak yang meluas pada masyarakat.

LSM berperan memberikan pelayanan kemanusiaan pada masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka pada pemerintah, mengawasi jalannya kebijakan dan program pemerintah, dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. Kehadiran LSM dalam sistem politik yang modern dan demokratis tidak bisa dihindari. Sebab kehadiran LSM diperlukan sebagai penengah atau penyalur aspirasi masyarakat pada pemerintah.

Namun berdasarkan pengamatan empiris, LSM dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni LSM Plat Putih yang idealis, LSM Plat Merah yang kompromis, dan LSM Plat Hitam yang pragmatis. Pembagian tersebut dilihat dari tujuan dan fakta kerja dari masing-masing LSM tersebut. Namun dari ketiga jenis LSM tersebut yang paling berbahaya adalah LSM Plat Hitam yang menjadikan lembaga *civil society* itu sebagai alat untuk akumulasi kesejahteraan dengan cara yang singkat namun keliru.

Daftar Pustaka

- Abidin, H., & Rukmini, M. (2004). *Kritik dan otokritik LSM: membongkar kejujuran dan keterbukaan lembaga swadaya masyarakat Indonesia*. Piramedia, dengan dukungan Ford Foundation dan Yayasan TIFA. <https://books.google.co.id/books?id=3ITaAAAAMAAJ>
- Anjaini, J., Permatasari, M. N., Irawan, H., Kurniawati, A., Simangunsong, T., Hutabarat, P. U. B., Nurchamidah, N., Safingah, K., Mardika, H. P. K., & Setiyaningsih, L. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi, Model, dan Inovasi untuk Transformasi Sosial)*. Bayfa Cendekia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=sXofEQAAQBAJ>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Assadi, H., Hadi Dharmawan, A., & Adiwibowo, S. (2009). Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2), 231–258. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.5864>
- Auliya, S. (2023). *Civil Society Dan Kebijakan Publik: Advokasi Kebijakan Lbh Apik Jakarta. Skripsi PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan partai politik*. Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=XVXJhEO13pQC>
- Bengkulu.sahabatrakyat.com. (2017, February 8). *Peras Kepala SMP Rp 2 Juta, 4 Oknum LSM Ini Terancam 9 Tahun Penjara*. <https://bengkulu.sahabatrakyat.com/daerah/peras-kepala-smp-rp-2-juta-4-oknum-lsm-ini-terancam-9-tahun-penjara/>
- Bengkulutoday.com. (2017, December 5). *Diduga Memeras, Oknum LSM Bengkulu Utara Diamankan Polisi*. https://www.bengkulutoday.com/diduga-memeras-oknum-lsm-bengkulu-utara-diamankan-polisi#google_vignette
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi keempat. In *PT Gramedia Pustaka Utama*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EaDotwAACAAJ>
- Daeli, S. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat. *Jurnal Bina Praja*, 57–66. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.57-66>
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041>
- Gazali, N. (2017). *FUNGSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI KEKUATAN POLITIK DALAM MENGAWAL KASUS KORUPSI DI SUMATERA BARAT* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/25994>
- Herliandhy, S. A. (2016). Kekuatan Politik: Peran Indonesia Corruption Watch (icw) dalam Mengungkap Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1(2).

- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40762>
- Ismail Nurudin, S. H. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In Lutfiah (Ed.), *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Isrok, & Al Uyun, D. (2012). *Ilmu Negara*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=atm7DwAAQBAJ>
- Kompas.com. (2017, June 11). *Pasca OTT, Aktivis Pertanyakan Kasus Korupsi yang "Diputihkan"*. *Kejati Bengkulu*.
<https://regional.kompas.com/read/2017/06/11/09382701/pasca.ott.aktivis.pertanyakan.kasus.korupsi.yang.diputihkan.kejati.bengkulu>
- Kompas.com. (2023, October 17). *Peras Kepala Sekolah sampai Rp 12 Juta, Anggota LSM di OKU Timur Ditangkap*. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/17/113827378/peras-kepala-sekolah-sampai-rp-12-juta-anggota-lsm-di-oku-timur-ditangkap>.
- Liputan6.com. (2024). *Mengenal WALHI Adalah Organisasi Lingkungan Terbesar di Indonesia*. Liputan.Com. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5775521/mengenal-walhi-adalah-organisasi-lingkungan-terbesar-di-indonesia?page=5>
- Melina, D. (2017). *Analisis Pengaruh Praktek Mencari Rente (Rent Seeking) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN+6 Tahun 2000-2014* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/28662/>
- Pranoto, E. (2023). *Salah Kaprah Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat: Urgensitas dan Konsep Pengaturan LSM yang Dipisahkan dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*. *Bintang Semesta Media*.
<https://books.google.co.id/books?id=QpzcEAAAQBAJ>
- Stephanus, P. (2018). PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131–146.
- suaraindonesia-news.com. (2018, March 10). *Diduga Peras Kontraktor, Dua Oknum LSM 'Nakal' Bengkulu Selatan Diringkus Polisi*. <https://suaraindonesia-news.com/diduga-peras-kontraktor-dua-oknum-lsm-nakal-bengkulu-selatan-diringkus-polisi/>
- Syamsurijal, C. A. (2024). *Solusi Alternatif terhadap Berbagai Permasalahan Bangsa*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=pXQZEQAAQBAJ>
- Tirto.id. (2017, March 14). *Ada Tren Global Krisis Kepercayaan Terhadap LSM*. https://tirto.id/ada-tren-global-krisis-kepercayaan-terhadap-lsm-ckJr#google_vignette
- Waris, I. (2023). *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia: Masa Awal Kemerdekaan Hingga Masa Orde Baru*. Wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=9b0tEQAAQBAJ>
- Yatimah, D. (2024). *Manajemen Organisasi Non Pemerintah*. Bayfa Cendekia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yaADEQAAQBAJ>
- Zakaria Habib Al-Ra'zie, & Heru Wahyudi. (2022). KONFLIK KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN : STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017. *Jurnal Adhikari*, 1(3 SE-Articles), 131–140. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.39>